

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN



**PROJECT BASED TRAINING
DATA ANALYTIC FOR AUDIT
BATCH II**

**Muhammad Ricky Wicaksana
Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu
NIP 19960930 201801 1 001**

Daftar Isi

Ringkasan Materi	3
BAB 1. Data Umum Topik Pengawasan	4
A. Gambaran Umum Topik Pengawasan	4
B. Identitas Objek Pengawasan	5
C. Matrik Desain Pengawasan	5
BAB 2. Kegiatan Analisis Data	6
A. Kegiatan Analisis Data	6
B. Uraian Analisis Data dan Hasilnya	6
1. Hasil Kuesioner Gambaran Umum SPIP	6
2. Skor SPIP	7
3. Skor PK APIP	7
4. Opini BPK atas Laporan Keuangan	7
5. Nilai Evaluasi SAKIP	8
6. Nilai EKPPD	8
7. Hasil Analisis	9
BAB 3. Penutup	16

Ringkasan Materi

Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah yang mengarah pada *clean and good governance*. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, setiap instansi pemerintah secara garis besar diwajibkan untuk menerapkan SPIP. Dalam PP tersebut, yaitu pada pasal 47 ayat 1, juga dinyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan masing-masing.

Pada dasarnya tujuan pelaksanaan pemerintahan daerah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah daerah antara lain melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Berbagai upaya juga telah dilakukan pemerintah daerah misalnya dalam bentuk penataan kelembagaan, perbaikan peraturan perundang-undangan, dan penyusunan perencanaan pembangunan yang lebih baik. Namun demikian, masih terdapat banyak permasalahan dalam pelaksanaannya. Permasalahan yang masih terjadi menunjukkan bahwa tujuan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan belum secara optimal tercapai dan SPIP harus dilakukan.

Penyelenggaraan SPIP diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan SPIP dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang mencakup peningkatan kapabilitas APIP, pengelolaan risiko, dan pengendalian korupsi sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Laporan ini akan menjadi tolok ukur bagi tim SPIP Perwakilan BPKP dalam menyelenggarakan bimbingan teknis/pendampingan terhadap Pemerintah Daerah agar maksud dan tujuan bimbingan teknis/pendampingan lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan SPIP di Pemerintah Daerah.

BAB 1. Data Umum Topik Pengawasan

A. Gambaran Umum Topik Pengawasan

Proses penilaian dilakukan untuk mengukur tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP yang berfokus pada 3 (tiga) komponen yaitu kualitas penetapan tujuan, penyelenggaraan struktur dan proses, serta pencapaian tujuan yang mencerminkan hasil dari penyelenggaraan SPIP. Penilaian atas kualitas penetapan tujuan dilakukan untuk memastikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan telah sesuai mandat organisasi, berorientasi pada hasil, dan mempertimbangkan isu strategis. Penilaian atas struktur dan proses dilakukan terhadap 5 (lima) unsur pengendalian yang kemudian dirinci menjadi 25 (dua puluh lima) subunsur pengendalian. Masing-masing subunsur tersebut memiliki parameter yang menunjukkan kualitas pengendalian intern, pengelolaan risiko, serta upaya pengendalian korupsi.

Pencapaian tujuan organisasi dinilai melalui pencapaian 4 (empat) tujuan SPIP yaitu kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Kegiatan yang efektif dan efisien dinilai melalui capaian *Output* dan *Outcome* organisasi. Keandalan pelaporan keuangan dinilai melalui capaian opini atas laporan keuangan. Pengamanan aset negara dinilai melalui capaian keamanan administrasi, keamanan hukum, dan keamanan fisik terhadap aset. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dinilai melalui jumlah temuan ketidakpatuhan.

Selain penilaian terhadap 3 (tiga) komponen tersebut di atas, SPIP juga memperhatikan data dukung terkait capaian indikator *governance* Pemerintah Daerah yaitu Opini BPK atas Laporan Keuangan, nilai Evaluasi SAKIP, dan nilai EKPPD untuk Pemerintah Daerah.

Atas hasil pemetaan terhadap 3 (tiga) komponen utama dan data dukung, tim evaluasi BPKP dapat menentukan perencanaan atau strategi untuk melakukan bimbingan teknis/pendampingan kepada Pemerintah Daerah.

B. Identitas Objek Pengawasan

Pengawasan dilakukan terhadap seluruh Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu sebagai berikut:

1. Provinsi Bengkulu
2. Kota Bengkulu
3. Kabupaten Bengkulu Selatan
4. Kabupaten Rejang Lebong
5. Kabupaten Bengkulu Utara
6. Kabupaten Kaur
7. Kabupaten Seluma
8. Kabupaten Mukomuko
9. Kabupaten Lebong
10. Kabupaten Kepahiang
11. Kabupaten Bengkulu Tengah

C. Matrik Desain Pengawasan

Matrik desain pengawasan APP Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bertujuan untuk memberikan gambaran kondisi kebijakan dan potret Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah. Terdapat 7 (tujuh) informasi hasil pengawasan yang diharapkan dari hasil pengawasan sebagai berikut:

1. Gambaran umum SPIP 5 (lima) tahun terakhir;
2. Penerapan manajemen kinerja melalui evaluasi kinerja yang dilaksanakan setiap triwulan;
3. Informasi terkait penerapan manajemen risiko;
4. Komitmen pimpinan melalui penerapan manajemen risiko sebagai indikator penilaian kinerja;
5. Informasi mengenai kebijakan atau SOP antikorupsi;
6. Gambaran terkait saluran pengaduan masyarakat dan *whistleblowing system*;
7. Hambatan implementasi SPIP.

Rincian matrik desain pengawasan dapat dilihat pada **Lampiran I**.

BAB 2. Kegiatan Analisis Data

A. Kegiatan Analisis Data

Metode pengumpulan data dengan melihat fenomena yang terjadi dengan menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan suatu metode analisis statistik yang bertujuan untuk memberikan deskripsi atau gambaran mengenai subjek penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh dari kelompok subjek tertentu.

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari arsip Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu yang digunakan ketika melaksanakan *quality assurance* dan kuesioner yang diisi oleh seluruh Inspektorat di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.

B. Uraian Analisis Data dan Hasilnya

1. Hasil Kuesioner Gambaran Umum SPIP

No	Pemerintah Daerah	*P1	*P2	*P3	*P4	*P5	*P6	*P7	*P8	*P9
1	Provinsi Bengkulu	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2	Kota Bengkulu	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak
3	Kabupaten Bengkulu Selatan	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
4	Kabupaten Rejang Lebong	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya
5	Kabupaten Bengkulu Utara	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
6	Kabupaten Kaur	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
7	Kabupaten Seluma	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
8	Kabupaten Mukomuko	Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Tidak
9	Kabupaten Lebong	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
10	Kabupaten Kepahiang	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
11	Kabupaten Bengkulu Tengah	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak

*Keterangan:

P1 = Sudah mengikuti Diklat Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi?

P2 = Sudah melakukan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) jika sudah mengikuti Diklat Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi?

P3 = Sudah menerapkan manajemen kinerja melalui evaluasi kinerja yang dilaksanakan setiap triwulan?

P4 = Apakah Pemerintah Daerah telah memiliki kebijakan terkait Manajemen Risiko?

P5 = Apakah Risiko telah dituangkan dalam register risiko sesuai dengan Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang PPKD Nomor 4 Tahun 2019?

P6 = Apakah pimpinan sudah mendorong penerapan manajemen risiko, melalui penggunaan kinerja penerapan manajemen risiko sebagai indikator penilaian kinerja?

P7 = Apakah Pemerintah Daerah sudah menetapkan dan melaksanakan Peraturan atau SOP terkait antikorupsi?

P8 = Apakah Pemerintah Daerah sudah memiliki saluran pengaduan masyarakat?

P9 = Apakah unit kerja sudah menyelenggarakan sistem whistleblowing?

2. Skor SPIP

No	Pemerintah Daerah	SPIP 2016	SPIP 2017	SPIP 2018	SPIP 2019	SPIP 2020	SPIP 2021
1	Provinsi Bengkulu	2,1180	-	-	-	2,8875	-
2	Kota Bengkulu	-	1,5760	1,4350	3,0000	-	-
3	Kabupaten Bengkulu Selatan	1,6550	-	2,8500	-	-	-
4	Kabupaten Rejang Lebong	1,0340	-	1,2440	1,1648	-	-
5	Kabupaten Bengkulu Utara	2,4300	-	-	3,0000	-	-
6	Kabupaten Kaur	1,8659	-	-	-	-	-
7	Kabupaten Seluma	-	2,1100	2,8398	-	-	-
8	Kabupaten Mukomuko	1,4910	-	-	1,8705	-	-
9	Kabupaten Lebong	1,2250	-	-	3,0000	-	-
10	Kabupaten Kepahiang	1,5970	-	1,6920	-	-	2,9110
11	Kabupaten Bengkulu Tengah	1,8989	-	-	-	-	-

3. Skor PK APIP

No	Pemerintah Daerah	APIP 2016	APIP 2017	APIP 2018	APIP 2019	APIP 2020	APIP 2021
1	Provinsi Bengkulu	-	2	-	-	-	3
2	Kota Bengkulu	-	-	2 Plus	-	-	3
3	Kabupaten Bengkulu Selatan	-	-	2	-	2 Plus	-
4	Kabupaten Rejang Lebong	-	-	2	-	3	-
5	Kabupaten Bengkulu Utara	-	-	2 Plus	2 Plus	-	-
6	Kabupaten Kaur	-	-	2	-	-	-
7	Kabupaten Seluma	-	-	2	-	2	-
8	Kabupaten Mukomuko	-	-	2	-	2 Plus	-
9	Kabupaten Lebong	-	-	2	-	2 Plus	-
10	Kabupaten Kepahiang	-	-	2 Plus	-	-	3
11	Kabupaten Bengkulu Tengah	-	-	2	-	-	-

4. Opini BPK atas Laporan Keuangan

No	Pemerintah Daerah	Opini 2016	Opini 2017	Opini 2018	Opini 2019	Opini 2020	Opini 2021
1	Provinsi Bengkulu	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	-
2	Kota Bengkulu	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	-
3	Kabupaten Bengkulu Selatan	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	-
4	Kabupaten Rejang Lebong	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	-
5	Kabupaten Bengkulu Utara	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	-
6	Kabupaten Kaur	WTP	WDP	WDP	WTP	WTP	-
7	Kabupaten Seluma	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	-
8	Kabupaten Mukomuko	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	-
9	Kabupaten Lebong	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	-
10	Kabupaten Kepahiang	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	-
11	Kabupaten Bengkulu Tengah	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	-

5. Nilai Evaluasi SAKIP

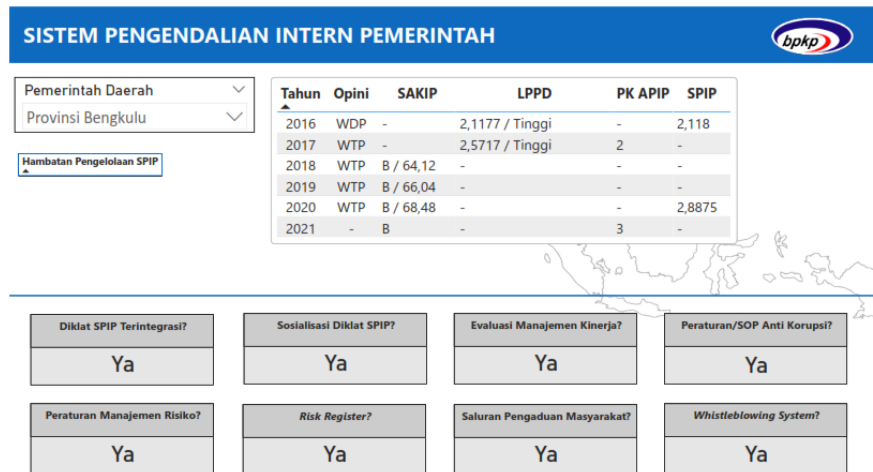
No	Pemerintah Daerah	SAKIP 2016	SAKIP 2017	SAKIP 2018	SAKIP 2019	SAKIP 2020	SAKIP 2021
1	Provinsi Bengkulu	-	-	B / 64,12	B / 66,04	B / 68,48	B
2	Kota Bengkulu	-	-	CC / 52,02	CC / 55,53	B / 60,04	B
3	Kabupaten Bengkulu Selatan	-	-	C / 48,53	C / 47,23	CC / 57,54	CC
4	Kabupaten Rejang Lebong	-	-	C / 46,27	C / 44,19	CC / 50,91	CC
5	Kabupaten Bengkulu Utara	-	-	C / 48,85	CC / 55,49	CC / 56,4	B
6	Kabupaten Kaur	-	-	C / 35,3	C / 34,33	C / 48,06	C
7	Kabupaten Seluma	-	-	C / 41,92	C / 46,48	CC / 58,74	CC
8	Kabupaten Mukomuko	-	-	CC / 50,02	C / 47,06	C / 48,37	C
9	Kabupaten Lebong	-	-	C / 46,87	CC / 51,72	B / 60,11	B
10	Kabupaten Kepahiang	-	-	C / 32,34	C / 46,41	C / 47,33	CC
11	Kabupaten Bengkulu Tengah	-	-	-	C / 56,59	CC / 56,72	CC

6. Nilai EKPPD

No	Pemerintah Daerah	LPPD 2016	LPPD 2017	LPPD 2018	LPPD 2019	LPPD 2020
1	Provinsi Bengkulu	2,1177 / Tinggi	2,5717 / Tinggi	-	-	-
2	Kota Bengkulu	2,7962 / Tinggi	2,8710 / Tinggi	2,0647 / Tinggi	2,8336 / Tinggi	2,8875 / Tinggi
3	Kabupaten Bengkulu Selatan	3,3024 / Sangat Tinggi	2,9320 / Tinggi	3,0533 / Sangat Tinggi	3,0919 / Sangat Tinggi	3,2268 / Sangat Tinggi
4	Kabupaten Rejang Lebong	2,8384 / Tinggi	2,7945 / Tinggi	2,9028 / Tinggi	2,5895 / Tinggi	2,9646 / Tinggi
5	Kabupaten Bengkulu Utara	3,4085 / Sangat Tinggi	2,9169 / Tinggi	2,8259 / Tinggi	3,1670 / Sangat Tinggi	3,2612 / Sangat Tinggi
6	Kabupaten Kaur	3,4268 / Sangat Tinggi	3,1867 / Sangat Tinggi	3,0692 / Sangat Tinggi	3,1200 / Sangat Tinggi	3,1358 / Sangat Tinggi
7	Kabupaten Seluma	3,1539 / Sangat Tinggi	2,7624 / Tinggi	2,7358 / Tinggi	2,6325 / Tinggi	2,8154 / Tinggi
8	Kabupaten Mukomuko	3,3419 / Sangat Tinggi	3,0152 / Sangat Tinggi	2,9928 / Tinggi	2,9554 / Tinggi	2,9251 / Tinggi
9	Kabupaten Lebong	3,1356 / Sangat Tinggi	2,7603 / Tinggi	2,9410 / Tinggi	3,0669 / Sangat Tinggi	3,2472 / Sangat Tinggi
10	Kabupaten Kepahiang	3,0078 / Sangat Tinggi	2,9120 / Tinggi	2,8846 / Tinggi	2,9717 / Tinggi	3,3003 / Sangat Tinggi
11	Kabupaten Bengkulu Tengah	2,9463 / Sangat Tinggi	2,7767 / Tinggi	3,0310 / Sangat Tinggi	3,0737 / Sangat Tinggi	3,3914 / Sangat Tinggi

7. Hasil Analisis

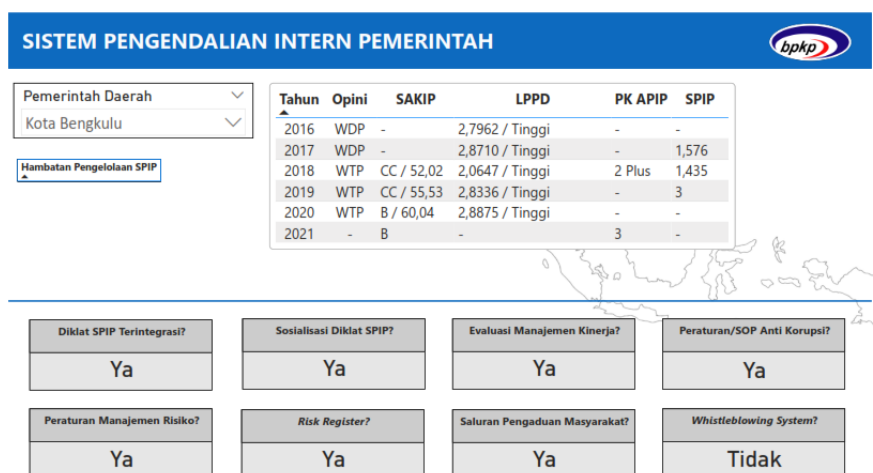
a. Provinsi Bengkulu



Sumber : Dashboard PowerBI

Pemerintah Provinsi Bengkulu sudah memiliki seluruh komponen penilaian SPIP Terintegrasi dan didukung dengan capaian PK APIP Inspektorat Provinsi Bengkulu, Opini BPK atas Laporan Keuangan, nilai Evaluasi SAKIP, dan nilai EKPPD. Berdasarkan data tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu dapat melakukan Evaluasi SPIP Terintegrasi atas Implementasi SPIP pada Pemerintah Provinsi Bengkulu.

b. Kota Bengkulu



Sumber : Dashboard PowerBI

Pemerintah Kota Bengkulu belum memiliki sistem pelaporan pelanggaran yang memungkinkan peran aktif pegawai dan pihak eksternal organisasi untuk menyampaikan pengaduan mengenai tindakan pelanggaran dan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai di organisasi atau *whistleblowing system*. Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu dapat memberikan pengertian dan rekomendasi untuk membuat *whistleblowing system*.

c. Kabupaten Bengkulu Selatan

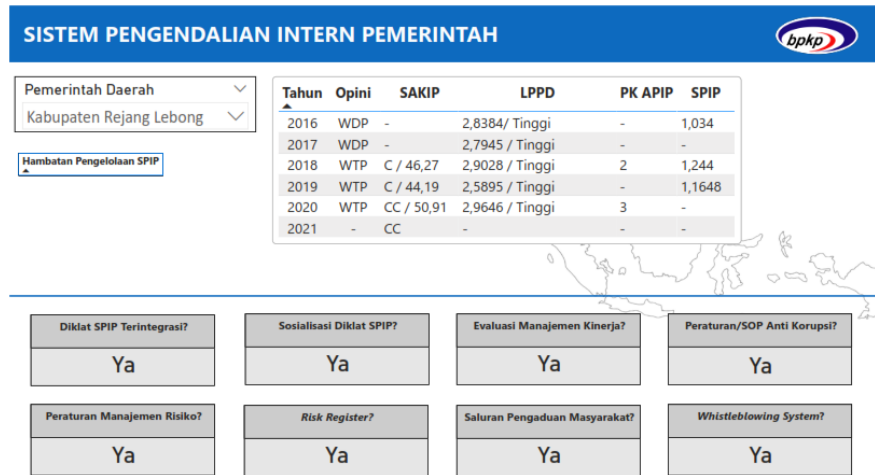


Sumber : Dashboard PowerBI

Penyelenggaraan maturitas SPIP terintegrasi tidak dapat dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan karena Opini BPK atas Laporan Keuangan selama tahun 2016 - 2020 adalah WDP. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan belum memiliki peraturan/SOP terkait anti korupsi, manajemen risiko, *whistleblowing system*, serta belum menyusun *Risk Register*.

Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu dapat memberikan rekomendasi tertulis kepada Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan terkait kurangnya implementasi SPIP pada Kabupaten Bengkulu Selatan.

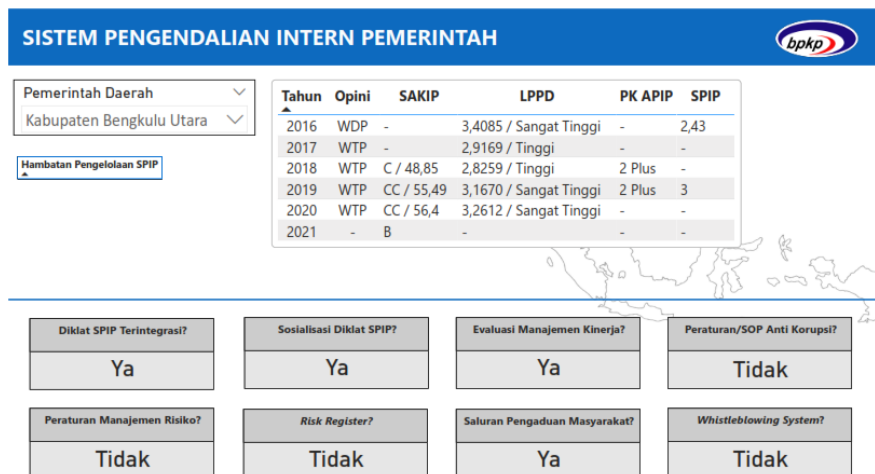
d. Kabupaten Rejang Lebong



Sumber : Dashboard PowerBI

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong sudah memiliki seluruh komponen penilaian SPIP Terintegrasi dan didukung dengan capaian PK APIP Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong, Opini BPK atas Laporan Keuangan, nilai Evaluasi SAKIP, dan nilai EKPPD. Berdasarkan data tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu dapat melakukan Evaluasi SPIP Terintegrasi atas Implementasi SPIP pada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.

e. Kabupaten Bengkulu Utara



Sumber : Dashboard PowerBI

Berdasarkan data di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu dapat melakukan bimbingan teknis terkait penilaian risiko sesuai dengan Peraturan Deputi Kepala

BPKP Bidang PPKD Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah serta memberikan rekomendasi kepada Bupati Kabupaten Bengkulu Utara untuk membuat peraturan terkait pengelolaan manajemen risiko, anti korupsi dan *whistleblowing system*.

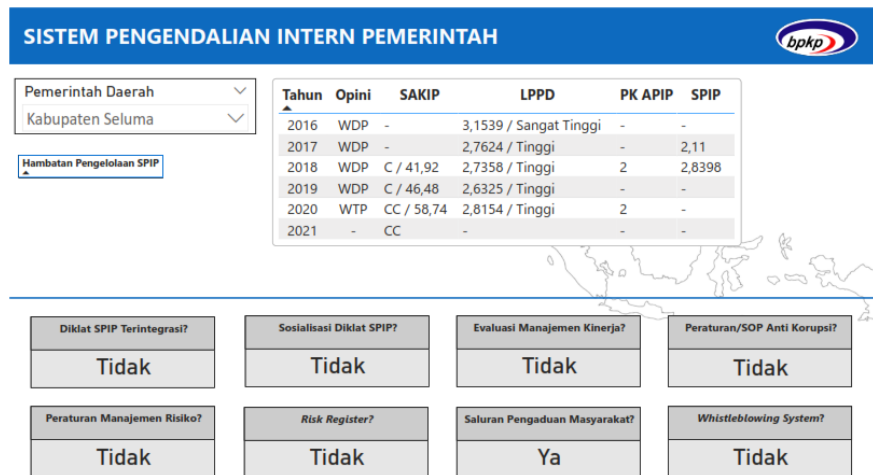
f. Kabupaten Kaur



Sumber : Dashboard PowerBI

Inspektorat Kabupaten Kaur sudah mengikuti diklat SPIP terintegrasi yang diselenggarakan oleh BPKP tetapi belum melakukan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) yang menyebabkan tidak adanya *transfer knowledge* antar pegawai. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kaur belum melakukan evaluasi manajemen kinerja dan manajemen risiko yang dilakukan oleh seluruh OPD. Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu dapat menyurati Inspektur Kabupaten Kaur agar pegawai yang mengikuti diklat segera melakukan *Transfer Knowledge* sehingga memiliki persamaan persepsi terkait penilaian SPIP terintegrasi sesuai Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

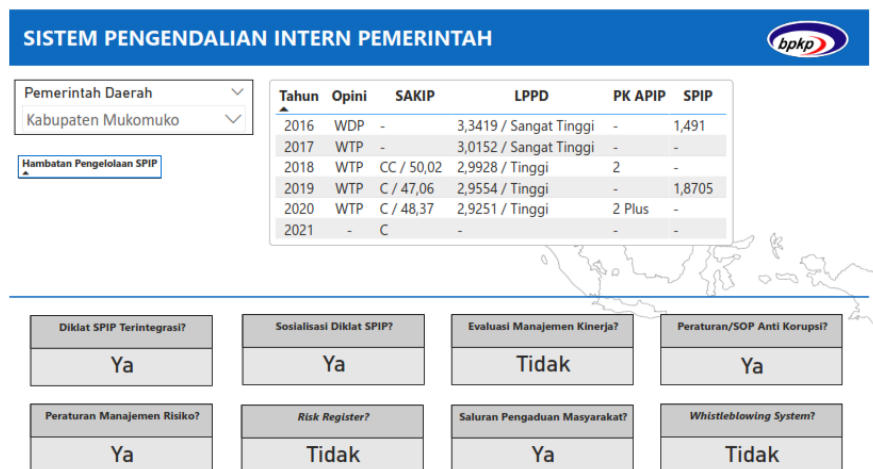
g. Kabupaten Seluma



Sumber : Dashboard PowerBI

Berdasarkan data diatas dimana Inspektorat dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seluma belum pernah mengikuti diklat SPIP terintegrasi, Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu dapat membuat *workshop* atau bimbingan teknis kepada seluruh asesor penilaian mandiri Kabupaten Seluma.

h. Kabupaten Mukomuko

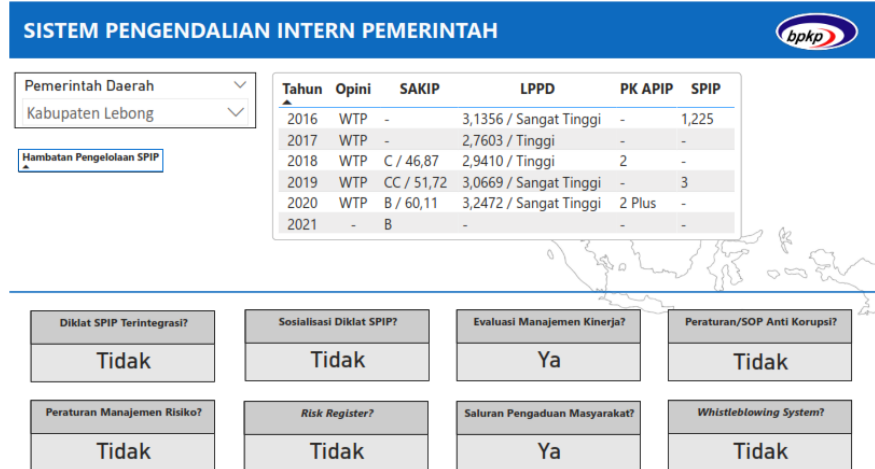


Sumber : Dashboard PowerBI

Berdasarkan data di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu dapat melakukan bimbingan teknis terkait penilaian risiko sesuai dengan Peraturan Deputy Kepala BPKP Bidang PPKD Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah dan memberikan rekomendasi kepada seluruh Kepala OPD

untuk melakukan evaluasi manajemen kinerja setiap triwulan serta menyediakan *whistleblowing system*.

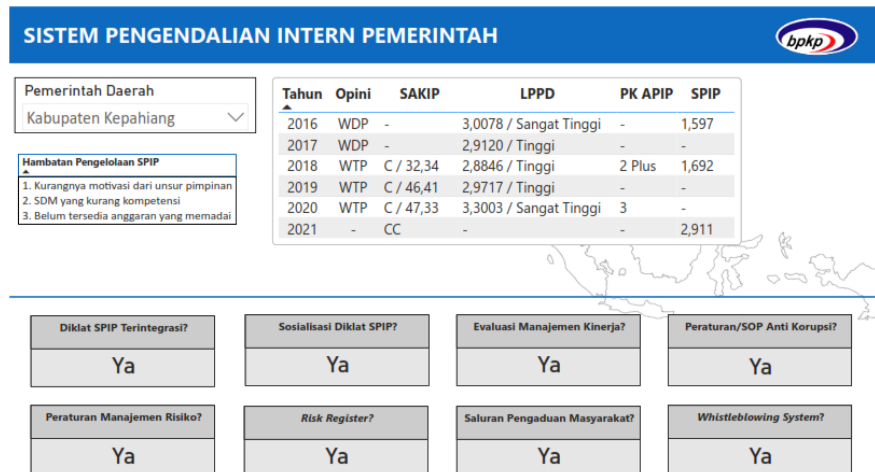
i. Kabupaten Lebong



Sumber : Dashboard PowerBI

Berdasarkan data diatas dimana Inspektorat dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebong belum pernah mengikuti diklat SPIP terintegrasi, Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu dapat membuat *workshop* atau bimbingan teknis kepada seluruh asesor penilaian mandiri Kabupaten Lebong.

j. Kabupaten Kepahiang

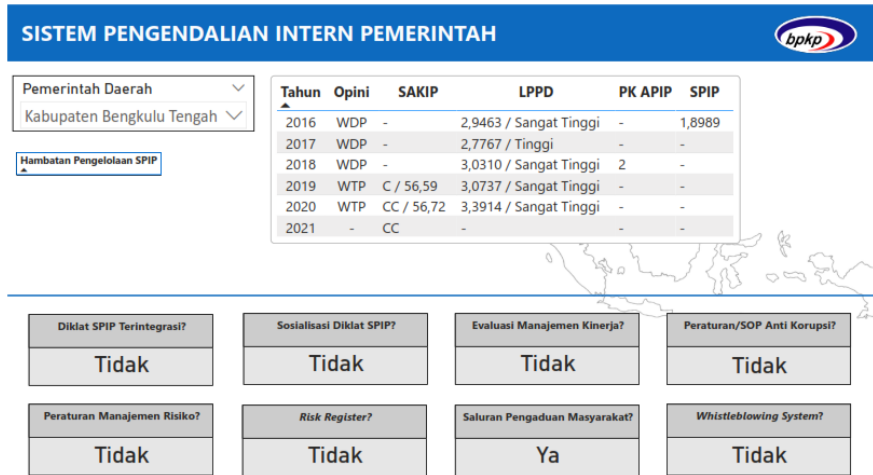


Sumber : Dashboard PowerBI

Pemerintah Kabupaten Kepahiang sudah memiliki seluruh komponen penilaian SPIP Terintegrasi serta didukung dengan capaian Opini BPK atas Laporan Keuangan,

nilai Evaluasi SAKIP, dan nilai EKPPD. Berdasarkan data tersebut, Perwakilan BPKP dapat melakukan Evaluasi SPIP Terintegrasi serta lebih menguatkan peran pimpinan dengan melakukan penandatanganan komitmen penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.

k. Kabupaten Bengkulu Tengah



Sumber : Dashboard PowerBI

Berdasarkan data diatas dimana Inspektorat dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah belum pernah mengikuti diklat SPIP terintegrasi, Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu dapat membuat *workshop* atau bimbingan teknis kepada seluruh asesor penilaian mandiri Kabupaten Bengkulu Tengah.

BAB 3. Penutup

Berdasarkan informasi potret data dan hasil analisis yang penulis lakukan atas gambaran umum Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu dapat melakukan evaluasi implementasi SPIP terintegrasi pada Pemerintah Provinsi Bengkulu, Kota Bengkulu, Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong.
2. Melakukan *Workshop* atau Bimbingan Teknis SPIP terintegrasi kepada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Lebong dan Kabupaten Seluma karena Inspektorat dan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Lebong dan Kabupaten Seluma belum pernah mengikuti diklat SPIP terintegrasi.
3. Menyurati Inspektur Kabupaten Kaur agar pegawai yang mengikuti diklat segera melakukan *Transfer Knowledge* sehingga memiliki persamaan persepsi terkait penilaian SPIP terintegrasi sesuai Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
4. Melakukan bimbingan teknis penyusunan *risk register* kepada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara dan Kabupaten Mukomuko sesuai dengan Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang PPKD Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah serta merekomendasi Kepala Daerah untuk membuat peraturan terkait manajemen kinerja, anti korupsi, dan *Whistleblowing system*.

MATRIK DESAIN PENGAWASAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

Unit Rendal : Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Sistem Tata Kelola Pemerintah Daerah
 Topik : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
 Periode Pengawasan : 2022
 Tujuan Pengawasan : Memberi Gambaran Kondisi Kebijakan dan Potret Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah

No	Pertanyaan Evaluasi	Kriteria Digunakan	Informasi Dibutuhkan dan Sumber	Metode/Teknik Pengumpulan Informasi	Metode Analisis Dipergunakan	Keterbatasan/Risiko	Antisipasi Risiko	Prakiraan Hasil	Penanggung Jawab/ Kontribusi	Waktu Selesai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Bagaimana gambaran SPIP selama 5 tahun terakhir?	1. PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 2. Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah	1. Laporan hasil penilaian mandiri Pemda 2. Laporan hasil evaluasi Perwakilan BPKP 3. Laporan hasil panel Deputi Kepala BPKP	1. Reviu/Telaah Dokumen 2. Wawancara	1. Analisis Deskriptif 2. Analisis Perbandingan	Dokumen laporan tidak ditemukan / lemahnya tata kelola arsip	Komunikasi dan koordinasi dengan pengelola arsip	Kondisi SPIP dan permasalahannya pada setiap Pemerintah Daerah		
2	Apakah terdapat hambatan dalam pengelolaan SPIP?	1. PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 2. Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah	Informasi hasil pengawasan dalam menganalisis dan memotret hambatan pengelolaan SPIP dan penggunaan aplikasi SPIP	1. Kuesioner 2. Wawancara	1. Analisis Deskriptif 2. Analisis Perbandingan	Responden salah mempersepsikan kuesioner/bias	Memberikan keterangan setiap kolom pengisian kuesioner	Hasil identifikasi penyebab hambatan pengelolaan SPIP pada Pemerintah Daerah		
3	Apakah Pemerintah Daerah sudah menerapkan manajemen kinerja melalui evaluasi kinerja yang dilaksanakan setiap triwulan?	1. PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 2. Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah 3. Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	1. Rapat pembahsan capaian kinerja triwulan I, II, III, IV 2. Pengukuran kinejra triwulan I, II, III, IV 3. LAKIP	1. Reviu/Telaah Dokumen 2. Wawancara	Analisis Deskriptif	1. Data tidak tersedia 2. Kesulitan mengumpulkan data pemda karena kurangnya administrasi arsip pada Pemerintah Daerah	Koordinasi dengan Inspektorat (tim inventaris) untuk menyiapkan data sebelum turun ke lapangan	Hasil evaluasi kinerja pemerintah daerah triwulan I, II, III, IV		
4	- Apakah Pemerintah Daerah telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko? - Apakah Risiko telah teridentifikasi dan dituangkan dalam register risiko?	1. PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 2. Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah 3. Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang PPKD Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah	1. Peraturan pemerintah daerah mengenai pengelolaan risiko 2. Daftar risiko	1. Reviu/Telaah Dokumen 2. Wawancara	Analisis Deskriptif	1. Pemerintah daerah belum memahami cara mengelola risiko 2. Risiko belum sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi	Melakukan bimbingan teknis pengelolaan risiko	Kondisi dan permasalahan manajemen risiko		

5	Apakah pimpinan sudah mendorong penerapan manajemen risiko, melalui penggunaan kinerja penerapan manajemen risiko sebagai indikator penilaian kinerja	1. PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 2. Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah	IKU pemerintah daerah	1. Reviu/Telaah Dokumen 2. Wawancara	Analisis Deskriptif	Kepala Daerah tidak <i>concern</i> terhadap manajemen risiko sehingga tidak memasukan manajemen risiko sebagai indikator penilaian kinerja	Menyurati seluruh Kepala Daerah terkait penerapan manajemen risiko sebagai indikator penilaian kinerja	Kondisi dan permasalahan manajemen risiko sebagai indikator penilaian kinerja		
6	Apakah Pemerintah Daerah sudah menetapkan dan melaksanakan SOP antikorupsi?	1. PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 2. Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah	SOP antikorupsi	1. Reviu/Telaah Dokumen 2. Wawancara	Analisis Deskriptif	1. Kepala Daerah tidak <i>concern</i> terhadap pengelolaan antikorupsi 2. SOP antikorupsi belum mencakup tiga proses prinsip dalam pengelolaan risiko korupsi, yakni cegah, deteksi, dan respons	Menyurati seluruh Kepala Daerah terkait penerapan pengelolaan antikorupsi dan hal yang harus tercantum didalamnya	Kondisi dan permasalahan pengelolaan antikorupsi		
7	- Apakah unit kerja memiliki saluran pengaduan masyarakat? - Apakah unit kerja sudah menyelenggarakan sistem whistleblowing secara mandiri dan telah dimanfaatkan secara konstruktif oleh pegawai dan stakeholder?	1. PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 2. Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah	1. PPID atau SP4N 2. <i>Whistleblowing system</i> pada Pemerintah Daerah	1. Kuesioner 2. Wawancara	Analisis Deskriptif	Responden salah mempersepsikan kuesioner/bias karena belum memahami sistem whistleblowing	Koordinasi dengan Inspektorat untuk memperkenalkan istilah <i>whistleblowing system</i> dan memberikan keterangan ada kolom pengisian kuesioner	Kondisi dan permasalahan saluran pengaduan serta <i>whistleblowing system</i>		